

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi resistensi Venezuela dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat pada masa pemerintahan Nicolas Maduro selama periode 2015-2025. Analisis difokuskan pada bagaimana relasi hegemonik dalam sistem internasional membentuk pola interaksi antara kekuatan besar dan negara berkembang, serta bagaimana Venezuela berupaya mempertahankan kedaulatan politik dan ruang otonomi kebijakan luar negerinya di tengah tekanan eksternal. Berdasarkan pendekatan teori diplomasi resistensi, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Venezuela pada periode tersebut mencerminkan dinamika antara praktik dominasi hegemonik dan upaya resistensi negara subordinat melalui berbagai strategi diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Dalam kerangka hubungan internasional kontemporer, distribusi kekuasaan global masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara negara-negara besar dan negara berkembang. Amerika Serikat sebagai kekuatan besar memiliki kapasitas struktural yang memungkinkan negara tersebut mempertahankan pengaruh global melalui berbagai instrumen kekuasaan, termasuk kekuatan ekonomi, institusi internasional, jaringan aliansi politik, serta dominasi dalam sistem keuangan global berbasis dolar. Dalam konteks kawasan Amerika Latin, posisi Amerika Serikat sebagai aktor dominan telah terbentuk sejak awal abad ke-20 melalui berbagai doktrin geopolitik dan kebijakan regional yang menempatkan kawasan tersebut dalam lingkup pengaruh strategis Amerika Serikat. Oleh karena itu, relasi antara Amerika Serikat dan Venezuela tidak dapat dilepaskan dari dinamika historis hubungan hegemonik yang membentuk pola interaksi asimetris di kawasan tersebut.

Eskalasi tekanan terhadap Venezuela meningkat secara signifikan sejak tahun 2015 ketika pemerintah Amerika Serikat menetapkan negara tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional melalui Executive Order 13692. Kebijakan ini menjadi dasar bagi penerapan berbagai bentuk sanksi ekonomi dan finansial yang secara bertahap diperluas pada tahun-tahun berikutnya, termasuk pembatasan akses pemerintah Venezuela terhadap pasar keuangan internasional serta sanksi terhadap perusahaan minyak negara, *Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)*. Menurut data U.S. Department of the Treasury, sanksi tersebut

bertujuan untuk menekan sumber pendapatan utama pemerintah Venezuela dan meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Nicolás Maduro (U.S. Department of the Treasury, 2019).

Selain melalui instrumen ekonomi, tekanan hegemonik Amerika Serikat juga diwujudkan dalam bentuk delegitimasi politik terhadap pemerintahan Maduro di tingkat internasional. Pada tahun 2019, Amerika Serikat bersama sejumlah negara sekutunya memberikan pengakuan terhadap pemimpin oposisi Juan Guaidó sebagai presiden sementara Venezuela. Langkah ini menunjukkan upaya untuk membangun konsensus internasional yang mempertanyakan legitimasi pemerintah Venezuela serta memperkuat isolasi diplomatik terhadap rezim yang berkuasa. Strategi tersebut mencerminkan penggunaan kekuatan normatif dalam praktik hegemoni modern, di mana produksi wacana mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan digunakan sebagai instrumen legitimasi dalam hubungan internasional.

Pemerintahan Nicolas Maduro mengadopsi strategi yang dapat dipahami sebagai diplomasi resistensi. Strategi ini tidak berfokus pada konfrontasi militer langsung dengan Amerika Serikat, melainkan pada upaya mempertahankan kedaulatan politik melalui kombinasi kebijakan domestik dan manuver diplomatik di tingkat internasional. Diplomasi resistensi dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan Venezuela mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional tanpa harus menarik diri dari struktur global yang didominasi oleh kekuatan besar.

Pada tingkat domestik, pemerintah Venezuela berupaya memperkuat legitimasi politik melalui konsolidasi institusional serta penguatan narasi kedaulatan nasional. Pemerintah Maduro secara konsisten membingkai tekanan ekonomi dan politik dari Amerika Serikat sebagai bentuk intervensi eksternal terhadap urusan internal negara. Narasi tersebut digunakan untuk memperkuat solidaritas politik domestik serta mempertahankan dukungan dari basis politik pemerintahan Bolivarian. Meskipun Venezuela menghadapi krisis ekonomi yang serius selama periode penelitian, pemerintah tetap berusaha mempertahankan stabilitas politik melalui berbagai kebijakan adaptif.

Salah satu aspek penting dalam diplomasi resistensi Venezuela adalah diversifikasi hubungan internasional dengan aktor non-Barat. Pemerintah Venezuela memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran, dan Turki dalam berbagai sektor,

termasuk energi, perdagangan, pertahanan, serta pembiayaan pembangunan. Kerja sama ini memberikan alternatif bagi Venezuela untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem ekonomi global yang didominasi oleh Amerika Serikat. Dalam sektor energi, misalnya, Venezuela menjalin kemitraan dengan Rusia melalui perusahaan energi Rosneft serta memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok melalui berbagai skema pembiayaan dan investasi dalam industri minyak.

Diplomasi resistensi Venezuela juga dijalankan melalui partisipasi aktif dalam forum multilateral. Venezuela memanfaatkan organisasi regional seperti ALBA dan CELAC untuk membangun solidaritas politik di antara negara-negara Amerika Latin yang memiliki pandangan kritis terhadap intervensi eksternal. Di tingkat global, Venezuela menggunakan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengangkat isu sanksi ekonomi unilateral sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. Upaya tersebut bertujuan untuk membangun dukungan dari negara-negara Global South yang memiliki pengalaman serupa dalam menghadapi tekanan ekonomi dan politik dari negara-negara besar.

Dalam konteks ekonomi, dampak sanksi Amerika Serikat terhadap Venezuela memang sangat signifikan. Sektor minyak yang merupakan sumber utama pendapatan negara mengalami penurunan produksi yang tajam setelah diberlakukannya sanksi terhadap PDVSA. Data dari U.S. Energy Information Administration menunjukkan bahwa produksi minyak Venezuela yang pada awal dekade 2000-an mencapai lebih dari 2 juta barel per hari mengalami penurunan drastis hingga berada di bawah 500 ribu barel per hari pada tahun 2020. Namun demikian, produksi minyak Venezuela mulai menunjukkan pemulihan bertahap pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai sekitar 800 ribu barel per hari pada tahun 2023 (EIA, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi ekonomi memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Venezuela, pemerintah tetap mampu mempertahankan sebagian kapasitas produksi melalui berbagai bentuk kerja sama internasional.

Krisis yang terjadi di Venezuela juga memiliki konsekuensi sosial yang luas. Menurut laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negara tersebut hingga tahun 2023 akibat kombinasi krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan penurunan kondisi sosial (UNHCR, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat tidak hanya

berdampak pada tingkat geopolitik, tetapi juga memiliki implikasi kemanusiaan yang signifikan bagi masyarakat Venezuela.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi tekanan eksternal yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak sepenuhnya berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mendorong perubahan rezim di Venezuela. Pemerintahan Nicolás Maduro tetap bertahan hingga pertengahan dekade 2020-an dan masih mempertahankan kendali terhadap institusi politik utama di negara tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi resistensi yang dijalankan Venezuela memiliki tingkat efektivitas tertentu dalam membatasi dampak tekanan hegemonik yang dihadapi.

Dalam perspektif hegemoni kritis sebagaimana dikemukakan oleh Cox (1983), struktur hegemoni tidak sepenuhnya meniadakan ruang agensi bagi negara yang berada pada posisi subordinat. Kebijakan luar negeri pemerintahan Nicolás Maduro dapat dipahami sebagai artikulasi narasi kedaulatan dan resistensi normatif terhadap dominasi Amerika Serikat. Ketika tekanan eksternal meningkat, terutama setelah pengakuan Amerika Serikat terhadap Juan Guaidó sebagai presiden interim pada tahun 2019, pemerintah Venezuela semakin menegaskan framing kedaulatan sebagai prinsip fundamental dalam hubungan internasional. Pada periode tersebut lebih dari 50 negara menyatakan pengakuan terhadap Guaidó (CSR, 2021), sementara Amerika Serikat mengalihkan kendali sejumlah aset luar negeri Venezuela seperti CITGO kepada otoritas yang diakui oposisi. Pemerintah Venezuela memandang langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan integritas teritorial negara (U.S. Department of State, 2021). Dalam kerangka Gramscian, strategi tersebut merepresentasikan upaya pembangunan *counter-hegemonic narrative* yang bertujuan menantang legitimasi moral dan normatif Amerika Serikat dalam tatanan internasional (Cox, 1983).

Diplomasi resistensi Venezuela juga memiliki berbagai keterbatasan struktural. Posisi Amerika Serikat dalam sistem internasional tetap sangat kuat, terutama melalui pengaruhnya terhadap sistem keuangan global, jaringan aliansi politik, serta institusi ekonomi internasional. Dominasi dolar dalam sistem perdagangan internasional masih memberikan keuntungan strategis bagi Amerika Serikat dalam menggunakan instrumen sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri. Selain itu, ketergantungan ekonomi Venezuela terhadap sektor minyak

serta dinamika politik domestik juga membatasi kemampuan negara tersebut untuk memperluas pengaruh diplomatiknya secara global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi resistensi Venezuela pada periode 2015-2025 merupakan bentuk adaptasi terhadap struktur hegemoni Amerika Serikat dalam sistem internasional yang hierarkis. Strategi tersebut mencerminkan perpaduan antara landasan ideologis Bolivarianisme dan pendekatan pragmatis dalam praktik kebijakan luar negeri. Venezuela berusaha mempertahankan kedaulatan politik melalui diversifikasi hubungan internasional, pemanfaatan forum multilateral, serta produksi narasi tandingan terhadap wacana hegemonik yang dibangun oleh Amerika Serikat.

Kasus Venezuela memperlihatkan bahwa relasi antara dominasi dan perlawanan dalam sistem internasional bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan distribusi kekuasaan global. Negara berkembang, meskipun menghadapi tekanan signifikan dari kekuatan besar, tetap memiliki ruang untuk membangun strategi adaptif guna mempertahankan otonomi politik dan eksistensinya dalam tatanan internasional. Dengan demikian, diplomasi resistensi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk strategi kebijakan luar negeri yang memungkinkan negara dengan kapasitas terbatas untuk menavigasi struktur kekuasaan global yang tidak seimbang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Dari perspektif akademik, kajian mengenai diplomasi resistensi negara berkembang terhadap kekuatan hegemonik masih membuka ruang eksplorasi yang luas. Penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis dengan memanfaatkan pendekatan teoritis yang lebih beragam, seperti teori ketergantungan, neo-Gramscian, maupun perspektif geopolitik kritis. Integrasi berbagai pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana struktur kekuasaan global memengaruhi pilihan kebijakan luar negeri negara berkembang.

Selain itu, studi komparatif antara Venezuela dan negara lain yang menghadapi tekanan serupa dapat memperkaya literatur mengenai strategi adaptasi terhadap sanksi dan isolasi diplomatik. Perbandingan dengan Iran, Kuba, atau Rusia, misalnya, dapat membantu mengidentifikasi pola umum maupun karakteristik spesifik dalam praktik diplomasi resistensi.

Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan empiris, tetapi juga memperdalam pemahaman konseptual mengenai dinamika dominasi dan perlawanan dalam sistem internasional.

Dari sisi kebijakan praktis, pengalaman Venezuela menunjukkan bahwa strategi menghadapi tekanan eksternal memerlukan keseimbangan antara kebijakan luar negeri dan penguatan fondasi domestik. Ketahanan ekonomi nasional menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya tawar internasional. Oleh karena itu, reformasi struktural di sektor ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan negara, serta penguatan institusi domestik perlu menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan strategi diplomatik.

Diversifikasi mitra internasional juga perlu dilakukan secara selektif dan berbasis kepentingan jangka panjang. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap satu kekuatan tidak seharusnya menghasilkan bentuk ketergantungan baru terhadap aktor lain. Pendekatan yang berhati-hati dan berbasis evaluasi strategis akan membantu memastikan bahwa kerja sama internasional tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

Di tengah perubahan konstelasi global yang semakin kompleks, diplomasi yang adaptif dan terbuka terhadap dialog tetap menjadi instrumen penting dalam meredakan ketegangan. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi multilateral dapat membuka ruang negosiasi yang lebih konstruktif serta mengurangi risiko eskalasi konflik yang merugikan stabilitas regional.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa praktik diplomasi resistensi Venezuela pada era Nicolás Maduro memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana negara berkembang berupaya mempertahankan kedaulatan dalam sistem internasional yang tidak sepenuhnya setara. Tekanan ekonomi dan politik dari kekuatan besar tidak selalu menghasilkan kepatuhan, melainkan dapat memicu formulasi strategi alternatif yang bertujuan menjaga otonomi nasional.

Kasus Venezuela menunjukkan bahwa diplomasi bukan hanya instrumen kerja sama, tetapi juga sarana untuk mengelola tekanan dan mempertahankan eksistensi di tengah ketimpangan global. Dengan segala keterbatasannya, strategi yang dijalankan memperlihatkan adanya ruang manuver yang tetap tersedia bagi negara berkembang dalam menghadapi dominasi kekuatan besar. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami dinamika resistensi sebagai bagian dari praktik politik luar negeri negara-negara di kawasan Global Selatan.

